

BLIMBINGSARI: MODAL SOSIAL DAN PERAN PEMDA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN JEMBRANA, BALI

I Wayan Ruspendi Junaedi

Program Studi S1 Manajemen Universitas Dhyana Pura

ABSTRACT

Poverty is the biggest problem in the world and also as an enemy for all nations and we have commitment in order to reduce the poverty . In order to reducing the poverty in the country especially in Blimbingsari, the Local Government needs to develop the economy of their own region so that the regions (society/people) have their own welfare. In this paper the researcher, will explain about the role of the Local Government in kabupaten Jembrana, west Bali, Propince of Bali in order to developed the economy especially in Blimbingsari population, Melaya, Jembrana until they create an new entrepreneurs.

From that problem and statement above, the researcher make the main research question is that "how the Social Capital of the society and the local government role in order to develop the society economy in Blimbingsari". From that main research question, the researchr make a research problem in three research question i.e.: (1). What kind of role that the local government do for developing the economic in Blimbingsari? (2). What kind of the social capital that the society do for developing the economic in Blimbingsari? (3). What kind of national program for developing the economic in Jembrana, especially in Blimbingsari?

Keyword: Development, Poverty, Role, Local Government, and Social Capital.

ABSTRAK

Kemiskinan adalah masalah terbesar di dunia dan juga sebagai musuh bagi semua bangsa dan kami memiliki komitmen untuk mengurangi kemiskinan. Dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di negara terutama di Blimbingsari, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan perekonomian daerah mereka sendiri sehingga daerah (masyarakat / orang) memiliki kesejahteraan mereka sendiri. Dalam makalah ini peneliti, akan menjelaskan tentang peran Pemerintah Daerah di kabupaten Jembrana, Bali barat, Propince Bali dalam rangka mengembangkan ekonomi terutama di populasi Blimbingsari, Melaya, Jembrana sampai mereka membuat pengusaha baru.

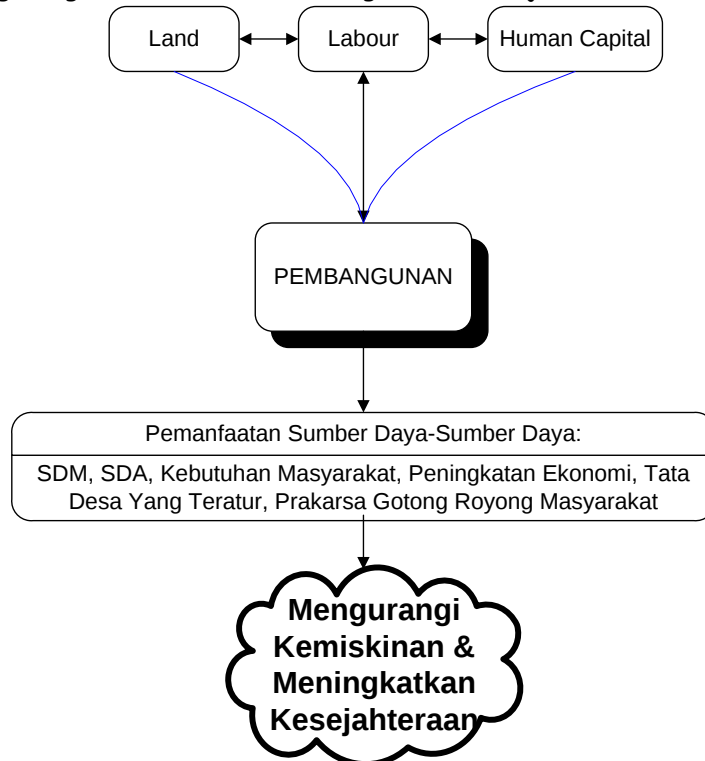
Dari masalah itu dan pernyataan di atas, peneliti membuat pertanyaan penelitian utama adalah bahwa "bagaimana Modal Sosial masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat di Blimbingsari". Dari pertanyaan penelitian utama, researchr membuat masalah penelitian di tiga pertanyaan penelitian mis .: (1). Apa peran bahwa pemerintah daerah lakukan untuk mengembangkan ekonomi di Blimbingsari? (2). Apa jenis modal sosial yang masyarakat lakukan untuk mengembangkan ekonomi di Blimbingsari? (3). Apa jenis program nasional untuk mengembangkan ekonomi di Jembrana, terutama di Blimbingsari?

Kata kunci: Pengembangan, Kemiskinan, Peran, Pemerintah Daerah, dan Modal Sosial.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan pembangunan bangsa, tujuan paling hakiki pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan merupakan musuh bersama dan bahkan sudah merupakan komitmen global untuk diperangi. Kemudian dalam Millenium Development Goal (MDG) tahun 2000 dipertegas kembali komitmen melawan kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian agar kemiskinan dapat diturunkan maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari suatu bangsa dan negara, harus benar-benar tertuju untuk mengentaskan warga negaranya dari himpitan kemiskinan. Untuk mengentaskan warga negaranya dari

himpitan kemiskinan pemerintah daerah perlu memberdayakan ekonomi masyarakatnya agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan peran pemda kabupaten Jembrana, Bali Barat, Propinsi Bali dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Jembrana, khususnya di Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Jembrana sehingga terbentuknya wirausaha-wirausaha baru. Perkembangan komunitas baru Blimbingsari tidak berbicara sejarah Blimbingsarinya, tetapi lebih ke arah pada pemberdayaan dan dinamika ekonomi dengan bantuan pemerintah Jembrana. Ada tiga peristiwa yang dilihat dari perkembangan komunitas tersebut: (1). Bentuk bantuan pemerintah, (2). Peningkatan daya beli masyarakat Blimbingsari, dan (3) PNPM MP maka penulis juga akan mengelaborasi teori tentang Pembangunan dan Modal Sosial. Gambar 1. Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan



Penjelasan Gambar 1: Dalam perjalanan pembangunan bangsa, tujuan paling hakiki pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan merupakan musuh bersama dan bahkan sudah merupakan komitmen global untuk diperangi. Kemudian dalam Millenium Development Goal (MDG) tahun 2000 dipertegas kembali komitmen melawan kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian agar kemiskinan dapat diturunkan maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari suatu bangsa dan Negara, harus benar-benar tertuju untuk mengentaskan warga negaranya dari himpitan kemiskinan.

Menelusuri perencanaan dan proses pembangunan tidak mudah, karena berkaitan dengan berbagai variabel pembangunan. Escobar, Arturo (ed) (1995), mengatakan bahwa para teorisi pada dekade 1950-an dan 1960-an cenderung memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, yang akan dialami oleh negara yang sedang membangun. Pada dasarnya, pandangan ini merupakan suatu bentuk teori ekonomi yang menyoroti pembangunan sebagai paduan dan kuantitas tabungan nasional, penanaman modal, dan bantuan asing dalam jumlah yang tepat. Dengan demikian pembangunan itu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Secara singkat, unsur utama strategi pembangunan yang umumnya dianjurkan pada tahun 1950-an adalah sebagai berikut: (1) akumulasi modal; (2) industrialisasi secara terencana; (3) perencanaan pembangunan; dan (4) bantuan dari luar. Teori pertumbuhan klasik dan neoklasik memberi dasar bagi model-model ini. Model tersebut mengasumsikan

sejumlah ciri-ciri yang dipegang secara baik untuk negara industri namun tidak untuk negara dengan ekonomi lemah.

Grillo, dan Stirrat. (1997), menyatakan bahwa pembangunan tidak bisa dilacak dan diteliti dari sudut antropologis saja, melainkan juga dalam konteks riil bersentuhan dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga perlu dipelajari makna dari antropologi pembangunan (*development anthropology*) dan antropologi dari pembangunan (*anthropology of development*), karena pembangunan melibatkan aktor (antropolog) dalam hal perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan. Pelibatan bidang ilmu antropologi dalam pembangunan berkembang pada tahun 1990-an. Pembangunan yang mempertimbangkan manusia dengan latar belakangnya sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Aktor pembangunan adalah masyarakat lokal yang ditempatkan sebagai obyek ilmu pengetahuan dan aplikasi dari pembangunan. Dengan mempertimbangkan pendekatan pembangunan yang merujuk pada pengetahuan lokal maka akan menempatkannya pada posisi agen pembangunan yang potensial. Oleh karena itu diperlukan suatu komunikasi antara agen yang ahli dan agen dari masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan. Langkah tersebut juga perlu dibarengi dengan menyebarkan pengetahuan atau rasionalitas pembangunan terutama adalah pembangunan masyarakat desa. Selama ini diketahui, bahwa pola pembangunan di Dunia Ketiga ditandai dengan indikator seperti: pola dikendalikan dari atas (*top-down*), berorientasi etnik (*ethnocentric*), pendekatan teknokratik yang memperlakukan masyarakat dan budayanya sebagai suatu konsep abstrak, sekadar digambarkan dalam paparan statistik, dan penggambaran relasi bangunan atas-bawah. Pola seperti itu harus segera mulai diubah. Pembangunan yang menjalin relasi secara harmonis harus dimulai. Menurut Like Hobart dan Escobar (1995), relasi ini mencakup: (a) pembangun, (b) yang menjadi obyek pembangunan, dan (c) komunitas yang melakukan resistensi terhadap pembangunan. Semua pihak itu harus bekerja sama dan membentuk 'an end to development'.

Crewe, Emma dan Elizabeth Harrison. (1988), menyatakan bahwa ada hambatan kultural dan jurang pemisah dalam pengetahuan lokal yang sering dipandang sebagai penghalang dalam intervensi pembangunan. Kultur lokal akan menentukan struktur kendali dalam penerapan program pembangunan. Kultur sebagai sesuatu yang ada di dalam dan di antara penduduk lokal sangat menentukan aktualisasi di mana agensi pembangunan bekerja. Pembangunan bukan lagi merupakan masalah nasional saja, tetapi global. Dampak dari pembangunan bukan hanya transformasi modal dan teknologi tetapi juga transformasi ideologi, nilai, dan budaya. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan pedesaan harus benar-benar dirancang secara tepat dan terpadu agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Pembangunan masyarakat desa yang berkesinambungan tidak akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat desa, tetapi justru akan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat desa.

Masyarakat desa dan Petani merupakan dua kata yang maknanya tidak terpisahkan, karena bisa dilakukan oleh satu aktor. Seorang petani yang hidup di desa masa depannya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar luas lahan yang diolah dan seberapa besar keuntungan dari hasil panen yang dapat di ambil. Jika hasil panen tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka seorang petani dengan penuh resiko akan keluar dari sektor pertanian dan mencari alternatif sumber pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkurangnya lahan pertanian maka petani semakin sulit mengandalkan sumber pendapatan dari petani, akibatnya petani semakin terpuruk oleh himpitan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi. Namun sebaliknya, Mengapa kehidupan petani di negara maju kuat? Kehidupan pertanian yang kuat di negara maju bukan merupakan hasil penciptaan dalam setahun dua tahun. Proses tersebut telah berlangsung lama dalam sejarah pembangunan di negara-negara maju tersebut.

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menjadi negara besar dan kuat apabila warga negara menjadi pemilik negara itu. Karena mayoritas penduduk

negara tersebut pada zamannya adalah petani, maka interpretasi petani memiliki negara tersebut secara konkrit harus diartikan bahwa para petani memiliki lahan yang cukup, termasuk para budak yang baru saja dibebaskan dari sistem perbudakan. Dengan dasar pandangan ini, Abraham Lincoln menciptakan undang-undang yang sangat terkenal, yaitu Homestead Act 1862. Undang-undang ini mentransfer tanah-tanah negara beralih kepemilikannya menjadi tanah-tanah petani. Karena itu tidaklah mengherankan luas areal pertanian per petani (1997) di negeri itu mencapai rata-rata 471 acres atau 190 ha, meningkat dari sekitar 70 ha pada 1940. Pelajaran utama dari kejadian ini bahwa hak hidup petani bukanlah sesuatu yang sifatnya kosong, tetapi dibangun dengan kebijaksanaan mendasar yang sekaligus juga meningkatkan kapabilitas petani tersebut, yaitu "*what farmers can do or can be*" (Pakpahan, 2003).

Apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap petani? Yang sudah dikerjakan tampaknya minimal, atau bahkan lebih bersifat memarginalkan petani. Proyek-proyek pembangunan pertanian, baik yang didanai oleh pinjaman luar negeri maupun yang dibiayai oleh APBN murni, perlu mendapatkan evaluasi yang seksama. Sebagai indikator kemajuan petani kita dapat melihat dari sudut kemampuan petani dalam skala usahanya. Luas areal per petani cenderung mengecil, makin gurem, berbeda dengan kecenderungan petani di Malaysia, Thailand, Amerika atau bahkan Jepang sekaligus. Dengan luasan lahan yang makin sempit itu, maka petani makin tidak bebas menggantungkan kehidupannya pada lahannya. Belum lagi kecenderungan penurunan harga riil produk primer yang terus menerus terjadi, maka pendapatan riil petani pun menjadi semakin berkurang. Selain itu munculnya persaingan produk-produk pertanian luar negeri yang dari segi harga justru lebih murah daripada produk-produk pertanian dalam negeri (Rajab, 1996). Dengan demikian, petani menjadi bertambah sulit karena sumber daya yang dikuasainya mengecil, masih ditambah lagi kesulitan bersaing dengan produk dari luar. Namun, Amal berkata : "Belajarlah dari petani karena mereka adalah guru yang sebenarnya. Mereka tak pernah putus asa dalam kegagalan. Mereka tetap sabar ketika pupuk hilang dan mahal di musim tanam. Mereka tak pernah menyerah ketika bencana alam dan hama menyerang. Mereka tak pernah "marah" ketika harga jual gabah saat panen jatuh", kata Amal Alghozali, Direktur PT SMS Indoputra (Kompas, 2006). Seiring kebutuhan yang terus meningkat maka tidak dapat dipungkiri agar dapat bertahan hidup maka mereka harus kreatif mencari alternatif memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat desa di dalam mempertahankan kehidupannya salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok-kelompok dari berbagai bidang kehidupan. Kelompok yang dibentuk, misalnya kelompok di bidang ekonomi dapat berupa kelompok arisan, kelompok tani, kelompok simpan pinjam, dan lain-lain. Di bidang sosial, misalnya kelompok RT, kelompok Bapak-Bapak, kelompok Lansia, dan lain-lain. Di bidang politik, masyarakat desa ikut berperan dalam partai politik. Kelompok tani misalnya adalah menjadi salah satu wadah membimbing petani menjadi pribadi yang mandiri (Manggolo, 2002). Selain itu strategi jaringan petani dapat menjadi alat yang efektif untuk berperan dalam perkembangan pertanian yang berkelanjutan. Para petani dapat belajar dari petani-petani lain, dapat bertindak sebagai mitra negosiasi, dapat berinvestasi secara bersama-sama dan dapat melibatkan mitra yang relevan. Dengan demikian peran institusional informal menjadi penting dalam mempertahankan suatu jejaring, misalnya seperti jaringan petani. (Oerlemans, 2003). Masyarakat desa perlu berjejaring karena sebagai individu butuh relasi dengan orang lain. Relasi yang dilakukan oleh masyarakat desa dapat meliputi relasi karena kepentingan kebutuhan di bidang pertanian, sosial, budaya, dan politik. Jejaring ini merupakan modal sosial dari masyarakat desa. Dengan berjejaring masyarakat desa dapat mendiskusikan masalah-masalah yang dialami untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Dengan berjejaring masyarakat desa dapat merasa lebih nyaman dan *survive* (bertahan hidup).

Ciri-ciri modal sosial akan semakin nampak jelas jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk modal sosial yang ada di masyarakat. Menurut Pantojo (1990), semua bentuk modal sosial dapat mempengaruhi tindakan kolektif, capaian ekonomi dan penguasaan disamping berperan menciptakan dan

memelihara kepercayaan umum. Adapun bentuk-bentuk modal sosial menurut Pantojo dan Coleman (1988), tersebut di antaranya:

- 1) Hubungan keluarga dan kekerabatan yang meliputi keluarga tunggal, keluarga luas, atau klan, berdasarkan pertalian darah dan kekerabatan yang kuat. Faktor penting adalah hubungan keluarga/kerabat tercipta dari kelahiran bukan pilihan.
- 2) Jaringan sosial yang meliputi kelompok ataupun organisasi yang menghubungkan individu dari keluarga atau kelompok berbeda dalam aktivitas bersama dengan bermacam-macam tujuan. Ini adalah bentuk modal sosial yang mendekati definisi dalam hal "jaringan ikatan sipil" atau "asosiasi lokal".
- 3) Hubungan lintas bidang atau 'jaringan dari jaringan', yang meliputi jaringan yang menghubungkan organisasi dari bermacam-macam sektor masyarakat (yaitu NGO, organisasi pekerja, agen pemerintah, perusahaan swasta) yang dapat menggabungkan sumber daya dengan jenis pengetahuan berbeda untuk menemukan solusi masalah yang kompleks. Melalui jaringan-jaringan ini, terbentuk hubungan lintas bidang publik-swasta, dan hubungan saling mendukung dan komplementer. Bentuk modal ini memberi artikulasi antara asosiasi dan organisasi vertikal dan horisontal.
- 4) Modal politik, meliputi norma dan hubungan jaringan antara masyarakat sipil dan negara sehingga masyarakat dapat menengahi konflik akibat permintaan warga negara. Modal politik terkait dengan perjanjian institusi informal yang menyebabkan klienisme, mencari sewa atau eksklusif, atau dalam perwakilan efektif, tanggung jawab, dan partisipasi. Ini adalah bentuk modal sosial yang terletak pada area "masyarakat politik."
- 5) Rangka kerja institusi dan kebijakan, meliputi aturan formal dan norma (konstitusi, hukum, peraturan, dan kebijakan) yang mengatur kehidupan umum. Ini adalah modal sosial tingkat makro yang memiliki sifat ganda karena mendorong menciptakan bentuk modal sosial lain dan membangun sumber daya dalam dirinya yang membantu tindakan. Eksistensi rangka kerja institusi penting untuk menciptakan dan memperkuat kepercayaan sosial umum.
- 6) Nilai dan norma sosial, meliputi kepercayaan budaya bersama dan dampak kepercayaan itu pada fungsi masyarakat. Nilai dan norma mendukung bentuk modal sosial lain dan mewakili bentuk modal sosial yang paling umum dan sulit.

Lyda Judson Hanifan (1920), dalam *The Community Center* mendefinisikan modal sosial sebagai kenyataan yang dimiliki warga, dapat berupa kehendak baik, simpati, persahabatan, hubungan sosial antar individu dan antar keluarga yang dapat membantu mengatasi persoalan warga masyarakat. Dalam konteks demikian, hubungan sosial yang baik antar anggota masyarakat menciptakan jejaring yang bersifat mutualis, dan bahkan mengalahkan individualitas. Coleman (1999), mengatakan bahwa nilai utama dari modal sosial terletak pada nilai dari struktur-struktur sosial dimana para aktor bekerja dan dipakai oleh para aktor sebagai daya untuk mewujudkan kepentingannya. Lang dan Hornburg (1998) mengungkapkan bahwa konsep Modal Sosial menyangkut dua dimensi yaitu *social glue* dan *social bridge*. Kerekatan sosial, disamping berisi kepercayaan sosial, juga mencakup kesediaan atau keikhlasan berpartisipasi (*willingness to participate*). Sedangkan jembatan sosial tidak sekedar diartikan jalinan antar kelompok, tapi juga keterbukaan akses bagi seluruh anggota masyarakat untuk berhubungan dengan sumber daya di luar sirkel mereka (Sudaryono, 2001).

Modal sosial pada prinsipnya merupakan pola hubungan dan norma yang dibuat oleh masyarakat, untuk mendukung keberadaannya dan untuk tetap *survive*. Modal sosial erat kaitannya dengan keberadaan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. "Modal sosial menjadi jiwa dan semangat yang menghidupi!" Modal sosial tidak akan membuat masyarakat kaku dalam menghadapi dinamika, bahkan menjadikannya

semakin lentur. Modal sosial akan mengisi dan memberi arah dinamika, sebaliknya modal sosial akan diperkaya oleh dinamika jaman. Kegotong royongan dan kebersamaan selalu relevan dalam kondisi apapun. Pada jaman krisis multidimensi pada saat ini nilai-nilai kegotong-royongan harus dibangun kembali (Lubis, 2002). Nilai kegotong royongan inilah yang masih ada pada sebagian besar masyarakat desa di negeri Indonesia. Meskipun dengan kualitas pendidikan yang masih rendah, namun tidak menjadi penghambat untuk dapat berjejaring dan saling menolong satu dengan yang lain.

METODELOGI PENELITIAN

Berawal dari ketertarikan, dimana Blimbingsari adalah Desa yang tadinya hampir 'desa mati' atau '*dying village*' pada tahun 1987, yang berubah menjadi desa yang 'hidup' atau '*a living village*'. Apa yang menyebabkan desa ini menjadi 'maju dalam bidang ekonomi'? Itulah yang menyebabkan penulis sangat tertarik meneliti di desa Blimbingsari. Disamping itu juga terbukanya relasi dan kesederhanaan serta kepercayaan menjadi salah satu keberhasilan dalam penelitian ini. Dari penjelasan dan pengantar diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam pembahasan ini secara garis besarnya adalah "Bagaimana peran Pemda Kabupaten Jembrana, Bali dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat Blimbingsari", yang dijabarkan dalam beberapa rumusan permasalahan. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: (1). Apa sajakah bentuk-bentuk bantuan dari Pemda Kabupaten Jembrana, Bali dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat Blimbingsari? (2). Bagaimana peningkatan daya beli masyarakat Blimbingsari? (3). Apa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Jembrana, khususnya yang ada di Blimbingsari?

Dari rumusan diatas, maka tulisan ini memiliki tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1). Untuk menggambarkan bentuk-bentuk bantuan dari Pemda Kabupaten Jembrana, Bali dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat Blimbingsari (2). Untuk mengetahui peningkatan daya beli masyarakat Blimbingsari setelah adanya bantuan dari Pemda Kabupaten Jembrana, Bali (3). Untuk menggambarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Jembrana, khususnya yang ada di Blimbingsari. Dalam mengumpulkan data-data lapangan, setidaknya ada dua proses utama yang dilalui. Yaitu observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya dalam bentuk *deskripsi*, penjelasan melalui wawancara dengan para tokoh warga Blimbingsari, pemerintah daerah yang langsung memberi bantuan dan penyuluhan untuk pemberdayaan ekonomi Blimbingsari. Pada akhirnya proses penelitian ini, termasuk membaca dan merenung harus diakhiri pada satu titik tertentu. Jika tidak, maka tidak ada tulisan yang berhasil (selesai) ditulis. Jika terus digali, maka datapun tidak akan habis. Dia akan selalu ada, terus ada dan selalu ada, selama si objek penelitian masih hidup. Perlu ketegasan dan kerelaan hati untuk memutuskan berhenti pada titik tersebut.

PEMBAHASAN

Dalam profil desa Blimbingsari, dibahas dua hal yaitu mengenai gambaran umum dan data serta aspek ekonomi Desa Blimbingsari. Desa Blimbingsari secara administrasi merupakan salah satu desa di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan luas 443 Ha, dengan rincian sebagai berikut: tanah pemukiman/pekarangan 55,88 Ha (12,61%), tanah perkebunan/ladang 351,12 Ha (79,26%), tanah sawah tadah hujan 10 Ha (2,26%), tanah adat 20 Ha (4,51%) dan lain-lain 6 Ha (1,35%) seperti diuraikan dalam table 1.

Tabel 1. Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan Tanah di Desa Blimbingsari.

No	Jenis Penggunaan	Luas Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah Pekarangan	55,88	12,61
2	Tanah Perkebunan	351,12	79,26
3	Sawah Tadah Hujan	10	2,26
4	Tanah Adat	20	4,51
5	Lain-lain	6	1,35
	Total	443	100,00

Sumber: Profil Pembangunan Desa, 2005

Desa Blimbingsari mempunyai dua banjar yaitu, Banjar Blimbingsari dan Banjar Ambyarsari. Jarak dari kota Kecamatan tujuh kilometer (7 Km), dari kota Kabupaten 25 Km, dan dari kota Denpasar 120 Km. Secara umum dikelilingi oleh hutan dataran rendah yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Bali Barat berbatasan dengan wilayah utara dari Desa Blimbingsari. Di wilayah timur Desa Blimbingsari berbatasan dengan Desa Ekasari, Di wilayah Selatan Desa Blimbingsari berbatasan dengan Desa Pangkung Tanah, Melaya. Termasuk wilayah dengan tofografi berbukit landai dengan kemiringan 0-9 derajat dan berada pada ketinggian 100 m - 200 m dari permukaan laut. Tergolong tanah yang cukup subur. Iklim Desa Blimbingsari beriklim tropis dengan kondisi angin bertiup lemah sampai sedang. Dengan udara bersih, sejuk, penataan tanaman bersih dan pot bunga yang sangat rapi karena dikelilingi oleh hutan dan perkebunan rakyat. Suhu rata-rata 22 sampai 26 derajat Celcius, curah hujan 1500 mm - 2000 mm (Profil Pembangunan Desa, 2005). Kebutuhan air bersih masyarakat disuplai dengan sumur bor dan sumur gali. Untuk perkebunan masyarakat dan tegalan disuplai dari air grojogan yang sering disebut "irigasi air hidup, tepat guna". Ada dua sungai yang mengalir memasuki desa Blimbingsari, yaitu sungai Melaya dan sungai Nyangkrut. Sungai Melaya dimanfaatkan sebagai bendungan/waduk yang didistribusikan, guna mengairi areal persawahan disamping air dari Grojogan, sekaligus dimanfaatkan sebagai wisata (*kano dan jukung*). Sungai Nyangkrut dipakai untuk mengairi perkebunan disamping air dari Grojogan. Dengan sistem pemipaan yang disosialisasikan oleh Pdt. Ketut Suyaga Ayub pada tahun 2004, sehingga semua ladang, kebun dapat dijangkau air. Di Grojogan yang dikenal dengan Taman wisata Grojogan diberi nama Lembah Ciptaning Hyang artinya "lembah yang diciptakan oleh Tuhan" (data primer, Suyaga Ayub, 2008) terletak disebelah utara Desa Blimbingsari, kira-kira 15-20 menit dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor atau mobil. Dilengkapi dengan lapangan bermain bola kaki, ayunan anak-anak *play group*, kawasan wisata dengan air terjun yang airnya dari pegunungan untuk berenang dengan pemandangan yang indah.

Tahun 1988 Blimbingsari hampir menjadi "*dying village*", dan pada tahun 2004 beberapa pendeta dari GKPB yang salah satunya adalah Pdt. Ketut Ayub Suyaga mencoba menghidupkan desa dengan memberikan motivasi dan visi kepada masyarakat Blimbingsari dan Gereja Pniel GKPB dengan konsep teologisnya: menjadi: "Terang dan Berkat bagi masyarakat sekitar dan dunia luar". Hal ini dilakukan karena desa Blimbingsari mengalami masalah sosial dan ekonomi berupa tingginya tingkat urbanisasi usia kerja ke kota sehingga dapat disimpulkan secara sederhana desa Blimbingsari hanya dihuni oleh orang-orang tua saja (*jompo*). Pada umumnya usaha ekonomi penduduk Blimbingsari adalah perkebunan, seperti kelapa, coklat dan peternakan, seperti babi, sapi dan ayam. Di bawah ini, penulis cantumkan gambar-gambar beberapa usaha ekonomi warga di desa Blimbingsari.

Gambar 2. Kebun Coklat, kelapa dan Peternakan Babi



[Kebun milik Bapak Suhardina]

Kebanyakan penduduk desa blimbingsari sangat taat kepada firman Tuhan tentang persembahan. Hasil kebun dari penduduk ini dipersembahkan 10% ke Gereja untuk diserahkan dan dikelola oleh Gereja. Tidak hanya hasil kebun saja tapi peternakan maupun hasil kantoran (gaji bulanan) juga dipersembahkan.

Gambar 3. Biji Coklat yang sedang dijemur milik Bapak Wayan Marji.

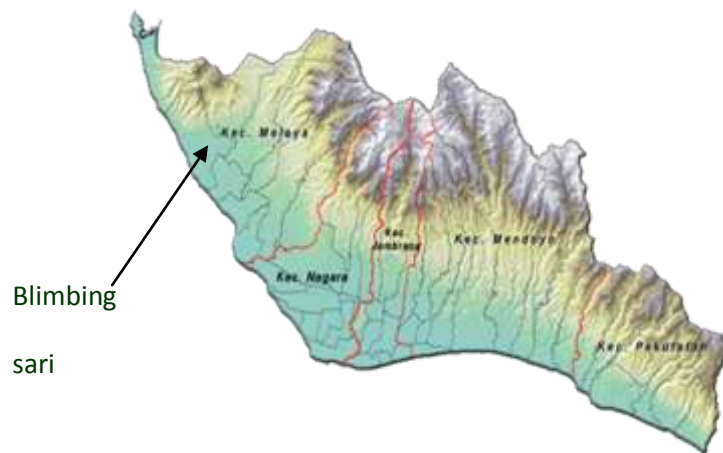


Gambar 4. Peternakan Babi milik Bapak Suhardina



Gambar 5. Usaha Kopra bapak Gede Karyan, Jemaat Pniel Blimbingsari





Gambar 6: Peta Kabupaten Jembrana, Bali Barat

Pemberdayaan oleh pemerintah daerah dalam pembentukan entrepreneurs di Blimbingsari berupa pemberian bantuan bibit sapi dan bibit coklat. Namun penulis akan menjelaskan terlebih dulu tentang bantuan bibit sapi baru kemudian bantuan bibit coklat. Pemerintah daerah memberikan bantuan sapi bibit dalam rangka memberdayakan masyarakat Blimbingsari secara ekonomi. Pemberian bibit sapi ini merupakan program pemerintah. Pada tanggal 6 Agustus 2010, ada 11 orang yang menerima bantuan bibit sapi ini dari pemerintah, sejumlah 17 ekor sapi. Dibawah ini adalah nama-nama penerima bibit sapi dari Blimbingsari sebagai berikut; gede Nung, Made Heskih, Made Natal, Gusti Putu, Bapang K, Gimani, Seprianus, Made Karsa, Ketut Adi P., Sunarwa, Made Karsa. Dalam istilah lokal pemeliharaan sapi bibit tersebut disebut "kadasin". Dalam pengalaman yang lalu sapi bibit ini banyak yang mati. Oleh karena itu dalam program bantuan bibit sapi kali ini pemerintah memberi penyuluhan atau pembinaan kepada peternak sapi.

Penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan program nasional, yang bertujuan memberikan modal pengetahuan kepada peternak sapi di Blimbingsari, khususnya dan Jembrana pada umumnya, agar sapi sapi tersebut gemuk dan menghasilkan hasil yang maksimal. Penyuluhan atau pembinaan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2010, di Desa Blimbingsari bersama-sama dengan seluruh penerima bibit sapi. Masyarakat Blimbingsari memanfaatkan Penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan Pak Ngurah tentang peternakan sapi yang ada di Blimbingsari:

"Secara teknis staff kami yang turun ke lapangan. Petugas ada di tingkat banjar, yang bisa memberi penjelasan terhadap apa yang terjadi di lapangan dan dibutuhkan masyarakat. Misalnya enam (6) bulan sekali ternak sapi harus divaksinasi. Karena tidak boleh sembarangan memvaksin ternak sapi. Penyakit mulut dan kuku diantisipasi dengan cara vaksin tadi. Staff kami adalah vaksinatur. Ada 5 orang vaksinatur di tingkat Kecamatan yang kita miliki. Mereka dijadwalkan ke daerah-daerah, apabila berbenturan dengan waktu, kita geser waktunya agar mendapat penyuluhan dan pembinaan. Semua staff kami harus menguasai semua bidang yang walaupun ada spesialisasinya".

Proses pemberian bibit sapi oleh pemerintah itu dimulai dari masyarakat Blimbingsari yang mengajukan permohonan ke aparat perbekel Desa Blimbingsari, dan setelah diketahui jumlah pemohon yang memohon, maka kepala desa (Bpk. John Ronny) membuat surat/proposal mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Setelah Pemda menerima surat permohonan atau proposal tersebut, barulah di kirim bibit sapi tersebut ke Desa Blimbingsari. Untuk menggembakkan seekor bibit sapi diperlukan keuletan dan kerja keras, karena peternak harus memberi makan sapi-sapi tersebut, baik dengan memberi makan konsentrat atau rumput gajah yang diperoleh di ladang. Dengan memberikan makanan berkonsentrat, untuk mencapai berat badan yang diperlukan, kelompok ini hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Pada saat itu kira-kira anak sapi

dibeli seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika sudah gemuk dijual dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Berarti mereka memperoleh selisih, dan selisih itulah yang menjadi pendapatannya sekitar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya makanan berkonsentrat.

Kebutuhan masyarakat akan daging sapi, baik di Blimbingsari dan di luar Blimbingsari, sangat tinggi. Desa tetangga seperti Pangkung tanah dan Melaya serta Eka sari, masyarakatnya banyak yang datang dan membeli langsung ke peternak sapi di Blimbingsari. Memang sistem pemasaran masih kurang baik, karena pemasarannya hanya berdasarkan informasi dari mulut kemulut tanpa memiliki sistem pemasaran yang bagus. Namun demikian, itulah kenyataannya bahwa di desa Blimbingsari memerlukan sistem pemasaran yang baik, sehingga hasil penggemukan sapi-sapi lebih cepat dijual dan bisa bersaing dengan harga pasaran. Perkembangan jumlah peternak sapi yang dimiliki oleh masyarakat Blimbingsari meningkat drastis. Tidak hanya 11 orang yang menerima sapi dari pemerintah itu saja yang memelihara sapi akhir - akhir ini, melainkan ada sejumlah orang yang melihat peluang yang baik ini untuk memberdayakan ekonominya untuk meningkatkan penghasilannya. Salah satu contoh adalah Pak Gede Marten. Dia memiliki tujuh ekor sapi, dimana tiga ekor dimiliki sendiri, dan empat ekor di bagi hasil dengan orang lain. Di bagi hasil artinya sapi-sapi tersebut dipelihara oleh orang lain (*dikadasin*). Orang lain memelihara sapi tersebut dan pada saat anak sapi berumur 5-6 bulan, "*godel*" /anak sapi tersebut dijual dan uangnya atau hasil penjualan sapi tersebut dibagi dua antara pak Gede Marten dan orang yang *mengadasin*. Biasanya Sapi yang di *kadasin* adalah sapi penginduk.

Dari contoh keluarga Pak Gede Marten, didapat gambaran yang sangat jelas mengenai harga jual sapi yang dimiliki masyarakat Blimbingsari lainnya. Pak Gede Marten menjual sapi, untuk yang sapi jantan dijual Rp. 3 juta x 4 ekor = Rp. 12 juta, sedangkan untuk yang sapi perempuan, dijual Rp. 2 juta x 4 ekor = Rp. 8 juta. Jadi Totalnya adalah Rp.10 Juta. Namun demikian, Pak Gede Marten tetap mengeluarkan biaya pakan/hari. Faktanya adalah biaya pakan 1 pikul untuk satu ekor. Biaya pakan Rp.10.000 per ekor sapi. Sehingga total biaya pakan dengan 8 ekor sapi sebesar Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Sehingga dari usaha penggemukan sapi ini, ditambah adanya sistem air irigasi yang baik tersebut maka dapat dikatakan bahwa Rp. 9.020.000 (Sembilan juta dua puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan peternak sapi selama 6 bulan. Kalau dirata-rata sebulan peternak sapi memperoleh penghasilan bersih Rp. 1.503.333.

Dari pemeliharaan sapi ini, masyarakat Blimbingsari mampu memperoleh penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka, Disamping itu juga, fakta dari keluarga Gede Marten mengatakan bahwa dari hewan ternaknya dia memperoleh pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran sapi dan air kencing sapi tersebut. Dalam wawancara dengan pak Gede Marten di Blimbingsari, mengatakan bahwa hotel Wana Villas di Palasari, Melaya, Negara membeli pupuk di Blimbingsari dan memanfaatkannya untuk tanaman/kebun hotel nya. Demikianlah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bibit sapi oleh pemerintah, dengan proses permohonan sampai penyuluhan dan pembinaan masyarakat Blimbingsari yang beternak sapi. Tujuannya jelas agar warga Blimbingsari berusaha dan mampu memenuhi kehidupan sehari hari baik untuk biaya sekolah anak-anak dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari pemeliharaan sapi ini.

Penerima bibit coklat dari pemerintah sejumlah 50 orang warga/masyarakat Blimbingsari. Sistem dan proses pemberian bibit coklat hampir sama dengan proses pemberian bibit sapi kepada Masyarakat Blimbingsari. Dimulai dari masyarakat Blimbingsari yang mengajukan permohonan ke aparat perbekel Desa Blimbingsari, dan setelah diketahui jumlah pemohon yang memohon, maka kepala desa (Bpk. John Ronny) membuat surat/proposal mengajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Setelah Pemda menerima surat permohonan atau proposal tersebut, barulah di kirim bibit coklat tersebut ke Desa Blimbingsari. Masyarakat Blimbingsari yang mengajukan permohonan ke desa masing-masing mendapat bibit coklat sebanyak 500-1000 bibit coklat, yang ditanam diladangnya dengan sistem tumpang sari. Tumpang sari

maksudnya adalah, bibit coklat ditanam bersama-sama dengan tanaman lain seperti kelapa dan pisang. Salah satu contoh penerima bibit coklat adalah Keluarga Gede Marten memiliki 400-500 batang pohon coklat di lahan-nya (diladangnya) yang teraliri air irigasi tepat guna sepanjang ladangnya.

Proses Panen dan Harga Coklat

Dengan perhitungan kematangan coklat yang telah dipahami oleh petani coklat, petani coklat memetik coklat dan hasil petikan ditempatkan dalam suatu wadah (berbentuk segi empat) yang digandengkan di motor (kendaraan pengangkut coklat) agar mudah membawa ke rumah petani tersebut. Sesampai di rumah, beberapa keluarga memanfaatkan anggota keluarganya (anak dan istri) untuk membuka dengancara membelah buah coklat tersebut dan mengambil bijinya saja. Biji coklat dikumpulkan jadi satu dan dipisahkan antara biji yang rusak dan biji yang baik. Biji coklat yang telah di kupas, ditempatkan dan dijemur di halaman rumah selama satu hari. Karena harga coklat itu dilihat dari kering-tidaknya biji coklat tersebut. Apabila bagus keringnya, biasanya bisa mencapai 1 kg dengan harga Rp. 20.000/dua minggu. Kasus yang dimiliki oleh Pak Gede Marten paling rata-rata mendapat setengah kuintal. Itu berarti Rp. 20.000x 50, sehingga penghasilannya setara dengan = Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/dua minggu atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan.

Prosesnya Penjualan coklat ke pengepul coklat dengan cara menjual biji coklat langsung di pekarangan rumah masing-masing masyarakat dengan menjemurnya. Biasanya ada pengepul/penjual coklat yang datang berkeliling dan menawar harga biji coklat masyarakat Blimbingsari. Biasanya, apabila pengepul 'X' dimana pengepul 'X' yang paling tinggi menawar, maka biji coklat itu dilepas. Pengepul/penjual coklat itu berasal dari orang luar Blimbingsari ada juga orang Blimbingsari. Harga coklatnya ter-gantung kering-tidaknya coklat tersebut. Makin kering biji coklat tersebut maka makin mahal harga coklat tersebut. Fakta terjadi bahwa biji coklat kering pernah mencapai harga sampai Rp.25.000/kg" . Dibawah ini adalah salah satu gambar Pohon coklat yang ada di kebun bapak Gede Marten.



Gambar 6: Kebun coklat milik Bapak Gede Marten

Wirausaha sebagai pengepul coklat telah mulai dilakukan pada tahun 2006, yang dimulai dari Desa Ekasari, Blimbingsari dan Ambyarsari. Kesehariannya dia berkeliling menggunakan pick-up terbuka warna merah, memakai topi bundar berwarna putih, membeli coklat masyarakat Blimbingsari dari rumah ke rumah penduduk desa Blimbingsari. Alasannya melakukan kegiatan sebagai pengepul coklat ini adalah bahwa dia melihat peluang yang menarik sebagai usaha untuk menambah penghasilan keluarganya, walaupun dia juga mempunyai usaha sampingan. Usaha sampingannya adalah menjual pakan babi, alat-alat pertanian dan ternak babi. Total biji coklat yang tertinggi yang pernah diperolehnya adalah 25 ton dari masyarakat Blimbingsari. Saat ini harga coklat 1 kg adalah berkisar antara Rp. 15.000 - 20.000, tergantung kering tidaknya coklat tersebut. Semakin kering coklat tersebut, maka harganya semakin tinggi. Sedangkan total coklat yang dibeli dari masyarakat Blimbingsari yang terendah yang pernah diperolehnya adalah 1 ton. Dalam wawancara

peneliti, yang dilakukan di Blimbingsari, tanggal 19 Juni 2011, Kadek Wangiasih menyatakan bahwa "Penghasilan saya rata-rata dari penjualan biji coklat perbulan rata - rata Rp. 2 - 2,5 juta. Penghasilan ini dapat menghidupkan keluarga saya dan mampu menyekolahkan anak-anak saya".

Hasil biji coklat yang telah dibeli dari Masyarakat Blimbingsari ini, dijual kembali ke negara, yang digunakan untuk kosmetik dan "snack" oleh pihak (perusahaan) lain . Dibawah ini, adalah gambar biji coklat yang dikeringkan di halaman rumah pak Wayan Murji yang dibeli oleh pengepul Ibu Kadek Wangiasih



Gambar 7: Biji Coklat yang sedang dijemur milik Bapak Wayan Marji

Wawancara peneliti dengan pak Ngurah, salah satu Pegawai Kecamatan yang membidangi pertanian mengatakan bahwa, "untuk para petani yang menggunakan pupuk, sudah beralih dari pupuk anorganik menjadi pupuk organik, agar tanah menjadi lebih baik" Program ini merupakan program pemda yang sudah dilakukan 3 tahun yang lalu sejak 2009. Pupuk anorganik ini menghasilkan sesuatu yang instan yang belum tentu sehat, lama kelamaan pasti ada efek negatifnya. Suatu contoh dikatakan bahwa padi yang memakai pupuk kimia DDT, lama -kelamaan tertimbun dalam tubuh dan menjadi penyakit. Disamping itu juga akan terjadi kerusakan lingkungan. Pestisida juga diganti sedikit demi sedikit, dengan pengendalian hama terpadu dengan 'SL' (sekolah lapang) yang langsung bisa dilihat diladang/disawah, sehingga tujuan menggunakan pupuk organik adalah baik agar lingkungan tidak rusak dan menjaga kesehatan tubuh kita dari apa yang kita konsumsi baik dari beras, sayur. Desa Blimbingsari memiliki ladang/kebun yang luas, maka kami dari kecamatan mengikuti saja apa yang diperlukan oleh masyarakat Blimbingsari mengenai coklat. Dominasi hasil kebun masyarakat Blimbingsari adalah coklat dan kelapa. Produksi coklat di Melaya, khususnya di Blimbingsari 2007 sampai sekarang secara umum cenderung mengalami penurunan. Salah satu penyebab turunnya produksi coklat karena ada hama penggerek buah coklat atau kakao. Buah coklat/kakaonya itu, cairannya dihisap oleh kepik atau sejenis kumbang, sehingga buahnya tidak tumbuh menjadi besar. Buahnya menjadi kecil-kecil dan keriput. 65 % produksi turun karena penggerek buah coklat ini. Sebelumnya juga ada penyakit Helopeltis, dengan pemangkasan dan pengaturan pencahayaan. Yang dilakukan adalah kondomisasi untuk mengurangi penyakit Helopeltis walaupun memang kurang efisien karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

Melihat fakta bahwa hasil kebun masyarakat Blimbingsari tersebut, maka ada beberapa penyuluhan/pembinaan yang juga dilakukan pemda mengenai coklat di Blimbingsari yaitu: Pertama, Rehabilitasi, artinya adalah memperbaiki kebun-kebun yang rusak, misalnya cabang coklat yang tidak dirawat dengan baik, dipotong dan cabang bawahnya langsung disambung. Kedua, intensifikasi, artinya kebun/ladang yang kekurangan pupuk atau kebun coklat yang kurang dipangkas. Memberikan pupuk yang seimbang dan memangkas beberapa dahan. Yang diharapkan ke depan adalah produksi coklat di Blimbingsari,

makin meningkat (salah satunya). Ketiga, Fermentasi artinya buah coklat di buat agar rasanya menjadi lebih enak, agar kualitas coklatnya menjadi lebih bagus. Dalam kenyataan yang ada di Blimbingsari, khusus untuk perkebunan saat ini adalah seluruh masyarakat Blimbingsari sudah menggunakan pupuk organik untuk perkebunannya.

Demikianlah pemda memberdayakan ekonomi masyarakat Blimbingsari dengan memberi bantuan biji coklat secara cuma-cuma, yang masing-masing pemohon menerima 500-1000 butir coklat, yang ditanami di ladang/kebun mereka masing-masing, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Blimbingsari. Harapan dan faktanya saat ini bahwa seluruh masyarakat memiliki ladang/kebun yang ditanami pohon coklat sebagai salah satu usaha pengembangan ekonomi masyarakat Blimbingsari untuk penghasilan keluarga di Blimbingsari. Dari hasil penjualan biji coklat tersebut masyarakat Blimbingsari dapat memperoleh pendapatan yang baik yang akhirnya mampu membiayai kebutuhan hidup

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat yaitu: membuka kesempatan kerja bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam Negeri yaitu, melalui pembentukan koperasi-koperasi Profesional. Koperasi yang telah dibentuk ada 3 yaitu: 1). Koprasi Megumi, bergerak di bidang Penyulingan air Laut menjadi air Mineral, lokasi di Desa Perancak dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 39 orang; 2). Koprasi Mekepong, bergerak di bidang Pemotongan Sapi dan Prosesing Daging, lokasi di Desa Lelateng, Kecamatan Negara dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 49 orang; 3) Koprasi Wisata Samudra, bergerak di bidang taman wisata dan kolam renang, lokasi di Desa Delod brawah dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 42 orang.

Penerapan yang terjadi di Desa Blimbingsari khususnya peningkatan daya beli masyarakat adalah adanya Koperasi Wanita, yang juga di bahas mengenai Kewajiban Koperasi Wanita tersebut pada tanggal 4 Januari 2010 . Pemerintah memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir serta konsultasi sebagai pembimbing dengan harapan koperasi-koperasi tersebut dapat mandiri dan menopang kekuatan ekonomi Kabupaten Jembrana umunya dan Blimbingsari pada khususnya. Dalam rangka membuka peluang bekerja di Luar Negeri Pemerintah daerah (PEMDA) bekerjasama dengan HRI (Hotel Restaurant International) dan IMM Jepang, dengan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Jembrana. Biaya pendidikan dan pelatihan sepenuhnya ditanggung Pemerintah. Peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) dengan bantuan peralatan kerja. Dalam kenyataan yang ada di Blimbingsari, khusus peningkatan daya beli masyarakat saat ini adalah Desa Blimbingsari sudah memiliki koperasi wanita (KopWan) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES ini dibentuk tanggal 20 November 2009, dari, untuk dan oleh warga Desa Blimbingsari. Saat ini diketuai oleh Bapak Kertya sebagai pengurus baru, karena BUMDES ini baru seumur jagung. Badan Usaha Milik Desa atau disingkat (BUMDES) ini, salah satu programnya adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa Blimbingsari. Masyarakat berhak meminjam dana dengan bunga yang sangat murah 1% dibandingkan tempat lain 1.7% di Maha Bhoga Marga (MBM). Harapannya adalah warga desa mampu meningkatkan kesejahteraannya dan membuka wirausaha-wirausaha baru. Fakta yang terjadi adalah lebih banyak warga meminjam uang (kredit) di BUMDES ini, karena tingkat suku bunga lebih rendah daripada bank komersial.



Gambar 8: Kepala Desa John Ronny (nomer 1 paling kanan) di Niti graha

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu: kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan PNPM-MP. PNPM-Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MP merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Di antara keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat.

Bali lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara dari pada nama Indonesia. Menyaksikan Bali dari kemasyuran tempat wisatanya seperti Kuta, Sanur, Nusa Dua, Tanah Lot adalah gambaran kemakmuran, eksotis serba mentereng, megah, mewah dan bahkan glamor. Potret wisata Bali terutama di daerah Badung dan sebagian kota Denpasar, seakan mengisahkan Bali bebas dari kontaminasi kemiskinan. Sungguh, Bali dari tampilan wajah pariwisatanya, seakan meyakinkan pengunjung bahwa provinsi ini tidak lagi tersentuh kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup yang menggambarkan kekurangan materi, biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Menurut Bank Dunia orang dikatakan miskin apabila pendapatannya tidak lebih dari US \$1 atau standar kemiskinan oleh BPS adalah ukuran pemenuhan kebutuhan 2100 kkal perhari/kapita. Bali adalah salah satu provinsi yang menjadi lokasi PNPM mandiri perdesaan sejak tahun 2003 di mana Bali juga mengalami dampak krisis dan pengaruh BOM Bali sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM). Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata manca negara masih memiliki jumlah RTM/RTS yang cukup tinggi. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdemensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang benar adalah memadukan aspek-aspek penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi PNPMnya adalah sebagai berikut: 1). peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. 2). pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, 3).Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, 4).peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi

masyarakat, 5). pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka melaksanakan visi misi PNPM-MP, strategi yang dikembangkan PNP-MP yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Dari visi, misi dan strategi ini, maka PNPM-MP berupaya menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih yaitu menuntaskan tahapan pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, setelah tahapan inisiasi dan internalisasi telah selesai dilakukan oleh PPK. Tujuan umum dari PNPM adalah "untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan". Sedangkan tujuan khusus dari PNPM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- 4) Menyediakan prasarana saran sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya badan Kerja Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan.
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam PNPM-MP adalah sebagai berikut: (1). *Penyadaran*. Melalui program PNPM-MP masyarakat diajak menemukenali potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengakses sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi secara partisipatif; (2) *Pembelajaran*. Setelah masyarakat dapat mengenali potensi, permasalahan dan sumber daya yang dimiliki langkah selanjutnya adalah mengajak masyarakat untuk belajar bersama dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki melalui pelatihan-pelatihan; (3) *Pengorganisasian*. Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan. Masyarakat tidak mungkin diorganisir tanpa pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara rutin untuk mengambil keputusan dan melihat apakah keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan; (4) *Penguatan*. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata "kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan". Pada saat masyarakat merasa memiliki potensi atau kekuatan, mereka tidak akan mengatakan lagi, "kami tidak bisa", tetapi mereka akan berkata "kami mampu". Masyarakat menjadi percaya diri. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Pada kondisi seperti ini bantuan yang bersifat fisik, uang, teknologi dan sebagainya. Hanya sebagai sarana perubahan sikap; (5) *Membangun Dinamika*. Dinamika orang miskin berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Perbekel Blimbingsari, maka prinsip-prinsip PNPM adalah "Bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas,

keberlanjutan". Dalam kenyataan di Desa Blimbingsari saat ini adalah bahwa semua prinsip PNPM MP telah berjalan dengan baik. Contohnya adalah bantuan pemda untuk irigasi air sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk perkebunan dan pekarangan yang ditambah dengan swadaya masyarakat Desa Blimbingsari. Penulis sudah melihat langsung dan mengambil gambar bersama Bapak Nyoman Muspa (staff yang melakukan operasional irigasi air) saat melakukan observasi.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini, dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Desa Blimbingsari. Di bawah ini penulis akan membahas tentang apa saja bentuk bantuan pemerintah untuk pemberdayaan Masyarakat Blimbingsari, kapan dan dimana dilakukan pemberdayaan tersebut. Ada banyak program yang diusulkan dari bawah, dalam hal ini dari Desa Blimbingsari. Program itu didukung dan didanai oleh Pemerintah dan juga swadaya masyarakat Blimbingsari. Alurnya adalah diajukan ke BPD (Badan Perwakilan Desa), BPD mengadakan rapat untuk menentukan prioritas mana yang akan diajukan, terus hasil rapat tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke kecamatan. Hasil dari kecamatan ini dibawa ke PemKab. Setelah disetujui, maka dana bisa digunakan oleh desa tersebut.

Program-program tersebut adalah: (1). Jalan Poros dari Jalan Utama ke Desa Blimbingsari. Tujuan pembuatan jalan poros ini adalah agar warga Blimbingsari bisa membawa hasil produksinya ke Kota/Melaya. Sehingga dengan adanya jalan poros ini yang menghubungkan jalan utama dengan desa Blimbingsari, memudahkan para petani, peternak melakukan jual beli di pasar. Pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga Blimbingsari, secara tidak langsung. (2). Jalan Hotmix dari Blimbingsari-Palasari-Persil-Melaya (West Bali Ring Road). West Bali Ring Road akhir tahun 2008 diusulkan kepada pemerintah dan Prebekel menghadap langsung kepada Bupati Jembrana. Tujuannya adalah karena banyak dilalui dan dimanfaatkan oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Sehingga tahun 2009, jalan berhomix telah terralisasi. Kenyataan yang terjadi adalah jalan ini sangat membantu warga Desa Blimbingsari dan desa - desa lainnya. (3). Pemadatan Jalan dari desa menuju ke kebun/ladang. Jalan ini telah dilaksanakan tahun 2008, dimana pemerintah memberikan alat berat/Bego, untuk memadatkan jalan dari jalan utama desa menuju ke kebun/ladang yang dimiliki oleh warga Blimbingsari. Faktanya bahwa warga Blimbingsari sangat dibantu dan memudahkan warga untuk pergi PP (pulang dan pergi) untuk merawat kebun dan ternak dengan lebih efisien. (4). Pembangunan, Balai Serba Guna dan Balai Kerawitan untuk seni budaya. Dalam rangka mempertahankan seni dan budaya, pemerintah memberikan dana bantuan untuk membangun Balai Serba Guna (BSG) Sari Asih dan Balai kerawitan. (5). Pembangunan Niti Graha sebagai Kantor Desa Blimbingsari. Pada tahun 2007 sudah dipercakapkan untuk membangun Pembangunan balai desa (kantor desa) yang lebih representatif. Hal ini juga melihat dari penilaian Lomba desa dimana kantor Blimbingsari dengan kantor desa yang tidak representatif. Insert gambar dibawah adalah Gedung Niti Graha yang telah di resmikan sebagai kantor kepala desa pada tanggal 25 Desember 2009 dan sekaligus pelantikan desa Adat Kristen Blimbingsari. Dana pemerintah dan swadaya masyarakat untuk membangun kantor ini.



Kepemimpinan Jembrana periode 2000-2010 adalah bupati yang kreatif, berwibawa, bersih, jujur dan memiliki integritas serta memikirkan kesejahteraan warganya. Ini terbukti dengan program dan hal-hal yang telah dibuat untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk warga Desa Blimbingsari. Program itu di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Jaminan kesehatan, kelas 3 gratis, kelas 2 bayar 50%, kelas 1 bayar 75%, VIP tidak ditanggung; (2) Pendidikan murah/gratis, sampai SMA gratis, namun untuk perguruan tinggi tidak ditanggung, tapi ada pembe-rian beasiswa apabila nilai anak/warga tersebut indek prestasinya 3,00. Beasiswa dalam bentuk uang sejumlah Rp. 700 ribu per bulan; (3) Lapangan olah raga, fasilitas tenis, basket, voli dan sepak bola, dan bulu tangkis disiapkan; (4) Pengurusan ijin yang baik, satu atap jadi lebih mudah dan kalau ada yang menggunakan calo, berarti membayar sejumlah kesepakatan. Tapi kalau mengurus sendiri tidak membayar; (5) Memotivasi industri untuk ber-kembang; (6) Harga barang standar artinya terjangkau bagi masya-rakat; (7) Irigasi yang baik dapat memenuhi kebutuhan petani dan ladang masyarakatnya; (8) Pengadaan air Air bersih dan penyuluhan air laut diubah menjadi air minum, yang disebut air megumi. Harganya lebih murah dari aqua atau air yang lainnya. Sehingga setiap kantor bupati tersedia air megumi ini yang langsung bisa diminum dari kran/pipa; (9) Pendaur ulangan sampah, sampah dibagi 3 jenis yaitu sampah basah (bekas makan-an), organik dan kaleng/daur ulang seperti kardus, koran dan botol. Sehingga sampah organik bisa menghasilkan kompos untuk pupuk. Bahkan sampai kekurangan sampah; (10) Melestarikan Budaya Lokal. Salah satu seni musik tradisional namanya "Jegog" yang menjadi gambelan ciri khas daerah jembrana. Dusun Blimbingsari mendapat hibah atau hadiah dari bupati berupa seperangkat alat musik "Jegog". Awalnya Komunitas Desa Blimbingsari tidak bisa memainkan alat ini. Terus dicarikan pelatih (dibayar) sehingga sekarang ada "sekaa" (artinya perkumpulan Seni Jegog). Akhir-akhir ini mampu menambah income/peng-hasilan desa (warganya) karena setiap ada tamu atau pementasan, kelompok (sekaa) ini dibayar kurang lebih Rp. 600.000/ pementasan. Ini sungguh membantu komunitas Blimbingsari.

Pada intinya, pemerintah sungguh mengambil peran dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Logika-nya adalah, pada saat Gereja Pniel Blimbingsari melakukan renovasi baik gedung gereja maupun yang lainnya, tidak sia-sia. Pihak Bank pemerintah atau donatur percaya, diberi pinjaman (memberikan dananya) untuk digunakan dalam pembangunan Desa Blimbingsari, dan dana yang dipinjam tersebut dapat dikem-balikan. Yang mengerjakan proyek renovasi tersebut adalah orang/warga Desa Blimbingsari sendiri. Itu artinya memberikan pekerjaan baru bagi warga Blimbingsari. Tentu Tenaga Kerja (TK) yang bekerja mendapatkan uang juga, sehingga dampaknya jelas adalah "kesejahteraan" bagi warga Blimbingsari. Sama dengan peran pemerintah, dalam pemberian dana bantuan kepada masya-rakat untuk membangun. Contoh, proyek baru di mana gereja ingin memadukan identitas Bali-Kristen dengan budaya Bali. Ketika disampaikan ke pemerintah, pemerintah menyambut dengan baik, yaitu pembangunan Kantor Desa, Bale Kerawitan, Awig-awig Desa Adat Kristen, Kuri Agung dan Balai Serba Guna (BSG) di samping program tersebut sejalan dengan program pemerintah. Walaupun pembangunan tersebut tidak secara langsung menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi warga Desa Blimbingsari.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diberikan kepada pembaca bahwa peran pemerintah kabupaten Jembrana sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mengurangi kemiskinan. Lebih jauh, untuk memberi kesimpulan dari pertanyaan besar yang telah diajukan di dalam rumusan masalah, maka dibawah ini ada tiga hal yang dapat disimpulkan. (1). Bentuk-bentuk bantuan dari Pemda Kabupaten Jembrana, Bali dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat Blimbingsari, berupa bibit sapi, bibit coklat, penyuluhan (baik penyuluhan tentang ternak sapi penggemukan dan pemeliharaan coklat), pembangunan Kantor Desa Blimbingsari, pembangunan bale kerawitan, pembangunan kuri agung, pembangunan Balai serba Guna (BSG) dan Awig-awig Desa Adat Kristen. (2). Peran pemerintah dalam

peningkatan daya beli masyarakat Blimbingsari dengan membentuk Koperasi Wanita dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Tujuan diberikan modal ini adalah masyarakat berhak meminjam dana dengan bunga yang sangat murah baik di koperasi wanita dan Badan Usaha Milik Desa. (3). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Jembrana, khususnya yang ada di Blimbingsari berupa: (a). Jalan Poros dari Jalan Utama ke Desa Blimbingsari, (b). Jalan Hotmix dari Blimbingsari-Palasari-Persil-Melaya (West Bali Ring Road), (c). Pemadatan Jalan dari desa menuju ke kebun/ladang, (4). Pembangunan Niti Graha, dan Balai serba Guna.

Demikianlah pemda Kabupaten Jembrana, Bali memberikan fasilitas sebagai cara langsung dan tidak langsung untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Blimbingsari. Fasilitas yang diberikan pemda tersebut berupa bibit sapi untuk dianakan, bibit coklat, air irigasi ke seluruh perkebunan, pekarangan rumah, pemadatan jalan, jalan poros dari jalan utama ke Desa Blimbingsari, serta jalan hotmix dari Blimbingsari-Palasari-Persil-Melaya (West Bali Ring Road). Disamping itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Jembrana, khususnya yang ada di Blimbingsari juga memberdayakan ekonomi desa Blimbingsari. Dengan memberi bantuan itu secara cuma-cuma, yang secara tidak langsung untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Blimbingsari, diharapkan bahwa seluruh masyarakat memiliki semangat yang ulet dan bekerja keras dapat memperoleh pendapatan yang baik yang akhirnya mampu membiayai kebutuhan hidup keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman James S. 2008. "Dasar-dasar Teori Sosial". Bandung. Penerbit Nusa Media
- Emma Crewe and Elizabeth Harrison (1988). *Whose development? An Ethnography of Aid*", Zed Books, London Newyork. *Cultural Barriers : The Triumph of Tradition Over Modernity*.
- Escobar, Arturo ((ed) 1995. "Encountering Development : The Making and Unmaking of The Thir World". Princeton Studies in Cultural/Power/History. Princeton Economic and The Space of Development : Tales of Growth and Capital.
- Francis Fukuyama (1999), "Social Capital And Cibil Society". George Mason University, The Institute Of Public Policy.
- Grillo, R.D. and R.L. Stirrat. 1997. "Discourse of Development : Anthropological Perspectives" Berg, Oxford. *Discourses of Development : The View from Anthropology* (pp 1-34).
- Lang, Robert E and Stefen P.Hornburg. 1998. What is Social Capital and Why is it Important to Public Policy. Housing Policy Debate. Volume 9. Issue I.Fannie Mae Foundation.
- Lubis,Heri.S.M. 2002. Wawancara tentang Modal Sosial itu Semangat yang Menghidupi. Jendela. vol 1, 4 Agustus .
- Oerlemans, Natasja and Gerald Assouline. 2003. Enhancing farmers'networking strategies for sustainable developmen. journal of Cleaner Production 12 .
- Pantoyo, Enrique. 2000. Exploring the Concept of Social Capital and Its Relevant for Community-Based Development : The Case of Social Capital Mining Areas in Orissa, India. The World Bank, Working Paper no.18.
- Purwita, Ida Bagus Putu, 1984 : "Desa adat dan Banjar Adat Bali", Denpasar, Percetakan Kawi Sastra.
- Sudaryono. 2002. Modal Sosial dan Pembangunan. Jendela, vol 1, 4 Agustus. Buletin STMD "APMD" Yogyakarta.
- Susan Saegert, Thompson, Warren. 2001. "Social Capital And Poor Communities".New York. Russell Sage Foundation.
- Todaro, Michael P. 2000: *Economic Development: Economics, Institutions, and Development: a Global Perspective*

Windia P. I Wayan. 2008. *Menyoal Awig-Awig. Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*. UNUD. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH.

Daftar Wawancara :

- 1) Kepala Desa Blimbingsari, Bapak John Ronny
- 2) Tokoh masyarakat Blimbingsari Bapak I Nyoman Yusuf
- 3) Peternak Sapi Blimbingsari Bapak Gede Marten
- 4) Pengepul Coklat Ni Kadek Wangiasih
- 5) Kaur Pemerintahan Blimbingsari Bapak Giman
- 6) Petani Coklat Bapak Wayan Marji
- 7) Bupati Jembrana Prof. DR.,drg., Gede Winasa
- 8) Peternak babi Bapak Suhardina
- 9) Penjual Butir kelapa ke Jawa Lamongan Bapak Gede Karyan